

Penerimaan Pengungsi Afghanistan oleh Korea Selatan pada Tahun 2021 Melalui Operation Miracle

Layli Ramadani^{1*}, Anita Afriani Sinulingga^{2*}, Silvi Cory^{3*}

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹layliramadani11@gmail.com*, ²nanisinulingga@gmail.com*,
³silvicory@soc.unand.ac.id*

Abstract

South Korea is one of the countries that ratified the 1951 Refugee Convention in 1992 and implemented it into domestic regulations in 2013. Even though it has been ratified and implemented, the rate of acceptance of refugees in South Korea is very low. In 2020 the refugee acceptance rate is less than two percent of the number of incoming asylum applications. South Korea appears to have implemented a policy that is closed to refugees as seen from one of the policies for returning refugees directly which is not in line with the provisions of the 1951 Refugee Convention. But in 2021, the government adopt a more hospitable policy towards refugees originating from Afghanistan. This study aims to explain the factors that influence the acceptance of Afghan refugees by South Korea in 2021. This research is analyzed using the concept of foreign policy change by Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis. This study used a qualitative research methodology and a descriptive-analytical type of research. Based on the concept used, the first factor affecting the acceptance of Afghan refugees by South Korea in 2021 is the domestic structural parameter influenced by the power of progressive parties in the legislature and executive and the existence of a network of advocacy groups. Second, international structural parameters influenced by the United States' encouragement of South Korea, and the role of the UNHCR in encouraging the acceptance of Afghan refugees.

Keywords: *Afghanistan, Foreign policy, Refugees, Refugee Acceptance, South Korea*

Pendahuluan

Pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berusaha keluar dari negaranya dan kemudian mencari perlindungan ke wilayah lain di luar batas negara asal yang diyakini aman demi kelangsungan hidupnya (Fadil and Yi 2019). Pada saat ini banyak negara yang berkonflik dan menjadi pro dan kontra bagi negara yang didatangi pengungsi meskipun perlindungan dan penerimaan pengungsi sudah menjadi tanggungjawab internasional. Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) tercatat lebih dari 89,3 juta pengungsi dan pencari suaka pada akhir tahun 2021 (UNHCR 2022a). Perlindungan dan pemberian bantuan atas pengungsi sudah diatur dalam The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 (Barnett 2002). Menerapkan prinsip

utama *non-refoulement* yang saat ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional (UNHCR 2022b).

Salah satu negara yang telah meratifikasi The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 adalah Korea Selatan pada tahun 1992 (Mee 2012). Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang mengimplementasikan The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 ke dalam UU domestiknya (Yoon, Fisseha, and Suk 2020). Hal ini terdapat dalam UU pengungsi “Refugee Act” yang mulai berlaku mulai 1 Juli 2013. UU ini mengatur dan mengontrol para pelamar pengungsi dengan mengajukan permohonan berdasarkan *Refugee Status Determination* (RSD).

Namun, dengan ratifikasi The 1951 Refugee Convention dan Protokol 1967 dan implementasi kedalam peraturan domestiknya, tingkat penerimaan pemerintah Korea Selatan atas permohonan pengungsi sangatlah rendah. Korea Selatan hanya menerima 1,5 persen dari total permintaan penerimaan pengungsi dalam rentang tahun 2010 hingga 2020 (“Migrants Refugee,,” n.d.). Korea Selatan baru menerima pengakuan pengungsi pertama pasca implementasi pada tahun 2001 setelah menjadi anggota dewan UNHCR setahun sebelumnya. Total aplikasi permohonan pengungsi yang masuk dari tahun 2017 hingga 2021 ialah 50.542 orang, namun yang diterima sebagai pengungsi hanya 485 orang (Ministry of Justice Republik of Korea 2022). Selain itu, sentimen publik di Korea Selatan memberikan pandangan negatif dan menganggap pengungsi sebagai ancaman akan homogenitasnya (Jun 2019).

Penolakan atas permohonan pengungsi yang berasal dari Yaman di Jeju, Korea Selatan pada tahun 2018 memicu sentiment negatif masyarakat saat itu. Dari 480 permohonan pengungsi yang berasal dari Yaman hanya dua orang yang diterima dan diberikan status sebagai pengungsi melalui proses yang panjang (New York Times 2018). Menanggapi hal ini banyak bermunculan demonstrasi anti migran yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan di seluruh kota yang berlangsung hampir tiga bulan lamanya. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan

kebijakan dengan menolak dan mengeluarkan Yaman dari daftar negara bebas visa untuk masuk ke Pulau Jeju.

Namun pergeseran kebijakan Korea Selatan dalam penerimaan pengungsi terjadi pada tahun 2021. Dalam pertemuannya, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In menyebutkan, “Korea Selatan harus menciptakan kesempatan untuk berkembang menjadi negara yang bermartabat dan mendukung HAM” (Yonhap News Agency 2021). Bentuk dari pergeseran kebijakan Korea Selatan atas pengungsi dapat dilihat melalui *Operation Miracle*. Operasi ini dibentuk untuk memproses penyelamatan dan penerimaan pengungsi yang berasal dari Afghanistan pada 24 sampai 27 Agustus 2021.

Operasi ini yang pertama dilakukan oleh Korea Selatan dalam penyelamatan dan penerimaan pengungsi asing dalam jumlah besar (Mangi 2021). Penerimaan atas hampir 390 orang pengungsi yang berasal dari Afghanistan ini merupakan angka yang besar dan hal yang paling terlihat mengingat rendahnya penerimaan pengungsi di Korea Selatan. Para pengungsi Afghanistan ini diberikan fasilitas yang terbaik mulai dari pembentukan pemukiman yang aman, dokter, perawat, hingga satu unit penjagaan guna memantau fasilitas (Ja 2021). Hingga program pembelajaran Bahasa Korea, budaya, hingga dukungan keuangan untuk membantu mereka beradaptasi (Ja 2021). Mereka juga diberikan visa jangka panjang yang memungkinkan untuk tinggal menetap dan mencari pekerjaan (Slavney 2021).

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat pergeseran kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi yang lebih terbuka dibandingkan kebijakan sebelumnya terhadap beberapa negara seperti Suriah, Yaman, dan Mesir. Penerimaan pengungsi Afghanistan dengan berbagai fasilitas yang diberikan membuat hal ini menarik dalam sejarah penerimaan pengungsi Korea Selatan yang rendah dan sulit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa faktor yang memengaruhi penerimaan pengungsi Afghanistan oleh Korea Selatan pada tahun 2021 melalui Operation Miracle.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, terdapat tiga tinjauan pustaka yang berasal dari artikel jurnal, pertama ada tulisan yang ditulis oleh Lee Shin Wha yang berjudul “*South Korea’s Refugee Policies : National and Human Security Perspectives.*” Permasalahan terkait pengungsi di Korea Selatan merupakan kebijakan dengan prioritas yang rendah. Pengungsi terbagi menjadi dua jenis, pengungsi global yang berasal dari berbagai wilayah, dan pembelot Korea Utara yang dianggap sebagai bagian dari Korea Selatan. Artikel Jurnal ini memberikan kontribusi awal bagi peneliti dalam melihat penanggulangan masalah pengungsi di Korea Selatan yang selama ini buruk. Pada penelitian ini akan melihat bagaimana berbagai hal yang memengaruhi kebijakan pengungsi Korea Selatan yang berbeda daripada kebijakan sebelumnya.

Referensi selanjutnya ialah artikel jurnal yang berjudul “*Voices of Ordinary Citizens: Ban Damunhwa and its Neoliberal Affect of Anti-Immigration in South Korea*” ditulis oleh EuyRyung Jun. Dalam artikel jurnalnya ini dijelaskan bahwasanya sentimen masyarakat yang anti akan imigrasi termasuk pengungsi sudah menjadi hal yang biasa terdengar di negara yang terkenal akan homogenitasnya, Korea Selatan. Artikel jurnal ini berkontribusi atas penelitian ini dalam memahami bagaimana kondisi internal Korea Selatan untuk menerima kehadiran pengungsi. Penelitian ini nantinya akan mengisi ruang dalam melihat bagaimana kondisi internal Korea Selatan mendorong adanya kebijakan yang lebih ramah atas pengungsi Afghanistan 2021.

Selanjutnya ada referensi dari artikel jurnal yang berjudul “*Threatened or Threatening?: Securitization of the Yemeni Asylum Seekers in South Korea*” yang ditulis oleh Eunyoung Christina Choi dan Seo Yeon Park. Protes anti-pengungsi yang terjadi di pusat kota Seoul berlangsung lebih dari tiga bulan dalam penolakan kehadiran para pencari suaka dari Yaman di Pulau Jeju. Pemerintah Korea Selatan kemudian melarang para pencari suaka dari Yaman ini untuk meninggalkan Pulau Jeju. Artikel jurnal ini berkontribusi dalam

memahami lebih dalam bagaimana kedatangan pengungsi Yaman pada tahun 2018 menyebabkan fokus sekuritisasi pengungsi di Korea Selatan menjadi isu keamanan yang mengancam masyarakat. Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana adanya pergeseran kebijakan yang sangat berbanding terbalik dengan perlakuan pemerintah terhadap pengungsi Yaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis guna menggambarkan dan melihat apa faktor yang memengaruhi, dan kondisi apa yang ada dalam suatu situasi sehingga terjadi penerimaan pengungsi Afghanistan oleh Korea Selatan pada tahun 2021. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui proses *library research* dan berasal dari beberapa buku, artikel jurnal, portal berita, dan website resmi untuk mendapatkan data yang relevan. Penulis memberi batasan penelitian ini dari tahun 2017 hingga 2023.

Penelitian deskriptif analitis ini dianalisis menggunakan teori *foreign policy change* oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis yang menjelaskan tiga jenis parameter yang menjadi faktor yang memengaruhi adanya perubahan dan pergeseran kebijakan yang tidak biasa suatu negara (Blavoukos and Bourantonis 2014). Pertama dilihat melalui *domestic structural parameters* dimana terdapat fungsi agregasi di dalam struktur politik dan kelembagaan domestik suatu negara yang dapat memengaruhi pergeseran suatu kebijakan (Blavoukos and Bourantonis 2009). Kedua, pergeseran kebijakan luar negeri suatu negara di pengaruhi oleh *international structural parameters* yang berasal dari keikutsertaan negara tersebut di dalam sistem internasional. Ketiga terdapat *domestic-international conjunctural parameters* dilihat melalui peristiwa dan kondisi yang tidak terduga sehingga berimbas terhadap status quo suatu negara.

Hasil dan Pembahasan

Pada permasalahan ini, ditemukan bahwasanya Korea Selatan telah mengeluarkan kebijakan yang berbeda dibandingkan kebijakan atas pengungsi yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Terlihat dari adanya Operation Miracle dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan pengungsi Afghanistan pada tahun 2021. Sehingga dapat dilihat faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengungsi Afghanistan tersebut berdasarkan konsep *foreign policy change* oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis.

1. Domestic Structural Parameter

Untuk melihat faktor yang memengaruhi penerimaan pengungsi Afghanistan oleh Korea Selatan pada tahun 2021, parameter domestik menjadi faktor terbesar dalam pergeseran kebijakan ini. Masa pemerintahan Presiden Moon Jae In yang dimulai pada tahun 2017 merupakan masa naiknya kembali kelompok progresif setelah dua pemerintahan sebelumnya dikuasai oleh kelompok konservatif, Park Geun Hye dan Lee Myung Bak (Ulfa et al. 2021).

Pertama, transisi dari sistem yang otoriter menuju demokrasi Korea Selatan ditandai dengan pemilihan presiden pada tahun 1987. Selanjutnya depolitisasi militer Korea Selatan ke dalam kendali sipil pada tahun 1990 dengan memenjarakan dua Jenderal saat itu (Lee and Lee 2021). Pada masa transisi ini muncul dua dimensi kelompok partai politik masyarakat yang dominan. Kubu konservatif mendukung dan mempertahankan ideologinya yang pro atas AS dan anti terhadap komunisme. Sedangkan kubu progresif atau oposisi mengadopsi pandangan yang lebih terpolarisasi seperti mendukung hak-hak buruh termasuk hak asasi manusia, dan pengawasan atas Chaebol yang lebih intens (Lee and Lee 2021).

Kebangkitan dan perpecahan antara kelompok progresif dan kelompok konservatif dalam ranah politik Korea Selatan berpengaruh atas kekuasaan dan perolehan mayoritas kursi di Majelis Nasional Korea (Milani, Fiori, and Dian 2019). Korea Selatan merupakan negara demokrasi dengan sistem multipartai,

kekuasaan legislatif dipegang penuh oleh pemerintah dan Majelis Nasional Korea. Sehingga baik itu kebijakan dalam negeri atau pun kebijakan luar negeri akan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kepemimpinan partai baik itu dipimpin oleh kelompok konservatif atau progresif dalam konfigurasi kekuasaan legislatif.

Berdasarkan pasal 60 konstitusi menyebutkan bahwa Majelis Nasional Korea Selatan memiliki hak untuk menyetujui perjanjian atau kebijakan yang dibuat oleh eksekutif baik itu dengan pemerintah asing atau organisasi internasional dalam bentuk saling membantu, keamanan nasional, perdagangan, perang, pengiriman pasukan (Snyder et al. 2018). Tanpa adanya ratifikasi dari Majelis Nasional Korea Selatan, eksekutif tidak dapat memberlakukan kebijakan luar negeri tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa majelis nasional dapat membatasi, menekan atau bahkan mendukung eksekutif untuk membentuk suatu kebijakan luar negeri.

Jika melihat susunan dari Majelis Nasional Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In, mayoritas kursi parlemen diduduki dan dikuasai oleh *Democratic Party of Korea/ Minjoo Party* dengan proporsi mencapai 56% (Korea n.d.). Proporsi ini terdiri atas elektoral distrik sebanyak 153 orang dan proportional representation 15 orang. Sedangkan untuk *People Power Party* sebagai partai konservatif terbesar Korea hanya memiliki proporsi di kursi parlemen sebanyak 38,33%. Proporsi ini terdiri atas 93 orang *electoral district*, dan 22 orang *proportional representation*.

Pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In yang berasal dari partai progresif, pemenuhan atas hak asasi manusia menjadi isu yang diperhatikan (Milani, Fiori, and Dian 2019). Evakuasi yang dilakukan atas pengungsi Afghanistan menjadi evakuasi orang asing yang pertama dilakukan oleh Korea Selatan. Sebelum dilakukannya penerimaan pengungsi Afghanistan, tentu saja dilakukan pertemuan dan pembahasan terlebih dahulu oleh anggota majelis. Melalui proporsi kekuasaan lebih dari 56% anggota Majelis Nasional yang berada sebagai perwakilan partai progresif menyebabkan kebijakan penerimaan

pengungsi ini muncul.

Kedua, di Korea Selatan sendiri banyak terdapat kelompok advokasi yang menyuarakan isu-isu terkait pemenuhan HAM termasuk juga masalah pengungsi. *Refugee Human Rights Network* merupakan jaringan dari beberapa kelompok pemerhati, pengawas, dan upaya pemenuhan HAM terutama terkait pengungsi. *Refugee Human Rights Network* berisikan hampir 30 kelompok advokasi.

Mempertimbangkan urgensi dan mengingat kejadian ini yang memerlukan perhatian terkait upaya penyelamatan dan perlindungan HAM para pengungsi, *Refugee Human Rights Networks* yang berada di Korea Selatan mengambil tindakan untuk mendesak pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah dalam upaya untuk melindungi pengungsi Afghanistan. Melalui media official websitenya, *Refugee Human Rights Networks* mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi desakan dan dorongan dalam dua poin pada 8 Agustus 2021, yaitu mendesak pemerintah Korea Selatan segera memberikan visa untuk dapat dievakuasi secepatnya, dan harus menanggukhkan pemulangan dan penahanan dari pengungsi Afghanistan. Lebih lanjut lagi untuk mengizinkan mereka tinggal dalam jangka waktu yang tidak dibatasi (Network 2021).

Selain melakukan desakan atas pemerintah untuk segera mengambil tindakan atas pengungsi Afghanistan melalui media onlinenya, *Refugee Human Rights Network* turut melakukan langkah nyata kepada pemerintah. *Refugee Human Rights Network* kemudian turut bekerja sama dengan sekitar 106 organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menjangkau Kementerian Luar Negeri secara langsung. Konferensi Pers dilakukan oleh *Refugee Human Rights Network* dan organisasi masyarakat sipil lainnya pada pertengahan Agustus 2021 di hadapan Kementerian Luar Negeri (Kyung 2021). Dengan meneruskan agenda yang sama dengan pernyataan resmi sebelumnya.

Ketiga, komunitas agama Kristen terutama konservatif di Korea Selatan memiliki kekuatan secara politik dan telah lama menggemakan gerakan

islamophobia. Para pemimpin dari gereja aktif dalam partisipasi politik sehingga memiliki suara tersendiri terutama dalam memengaruhi suara masyarakat akan isu tertentu. Secara historis, komunitas Kristen di Korea Selatan telah memainkan perang penting dalam politik melalui jejaring organisasi (Heo 2021). Kristen konservatif yang mulai meningkatkan visibilitas politiknya pada 1990an saat transisi dari pemerintahan otoriter menuju demokratis. Komunitas Kristen Korea mulai menjadi suara yang diperhitungkan dengan doktrin anti-komunismenya dan mampu memengaruhi pemerintah dan suara masyarakat.

Komunitas Kristen konservatif dan progresif memiliki sikap yang sama terhadap penerimaan pengungsi dalam permasalahan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Taliban sebagai kelompok islam fundamentalis ditakuti oleh masyarakat Afghanistan dan menjadi salah satu penyebab Islamophobia dan ketakutan oleh komunitas Kristen di Korea Selatan. Hal ini disebabkan oleh penculikan dan pembunuhan atas seorang sersan Korea Selatan di Afghanistan pada tahun 2007 dan penculikan sekitar 23 sukarelawan oleh Taliban di Gereja Bundang Sammul, Provinsi Geonggi, Korea Selatan yang menewaskan dua orang pada tahun yang sama yaitu 2007 (Jung 2021). Menghadapi kejadian ini, komunitas Kristen Korea Selatan menganggap bahwa Taliban adalah kelompok yang sangat anti Kristen, hal ini terbukti dari beberapa laporan anonim yang menyebutkan Taliban memburu rumah orang Kristen (The Korean Times 2021).

Pada tanggal 8 Agustus 2021, dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Afghanistan, *the Christian Ethical Movement Korea* melalui perwakilan Ki Yoon Sil mengeluarkan pernyataan resmi (Sujin 2021). “Kita perlu memperluas penerimaan kemanusiaan terutama atas perempuan dan anak-anak, terlebih lagi atas mereka yang dianiaya oleh Taliban.” Selain itu mereka juga mengimbau pemerintah untuk menerima pengungsi Afghanistan atas dasar kemanusiaan, dan gereja harus menyampaikan pesan kepada anggota untuk mengurangi rasa takut sebagai cara mempraktekkan kasih Tuhan untuk merawat umat manusia. Gereja dan berbagai asosiasi gereja harus menyediakan fasilitas dan dana untuk membantu pengungsi Afghanistan.

Delapan organisasi masyarakat sipil termasuk Dewan Gereja Kristen Korea pada 16 Agustus 2021 telah mengeluarkan pernyataan untuk mendesak pemerintah menerapkan langkah-langkah perlindungan pengungsi Afghanistan dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan (Sujin 2021). Mereka juga menekankan Korea Selatan untuk melakukan upaya diplomatik dalam menjamin hak asasi manusia terhadap perempuan dan pengungsi.

2. International Structural Parameter

Selain karena perubahan yang diakibatkan faktor domestik Korea Selatan itu sendiri, hubungan yang terjadi dengan negara lain ataupun komunitas internasional juga dapat menjadi penyebab perubahan dan pergeseran kebijakan luar negeri. Pertama, perang yang dimulai AS di Afghanistan tahun 2001 turut serta menciptakan konflik berkepanjangan antara Taliban dan pasukan militer AS di wilayah Afghanistan. Korea Selatan sebagai bagian dari sekutu mengirimkan pasukan non-militernya ke Afghanistan guna membantu proses rekonsiliasi pasca perang. Korea Selatan memenuhi kewajibannya sebagai sekutu AS dengan tujuan utamanya ialah anti-teorisme.

Untuk merespon krisis pengungsi di Afghanistan pasca pengumuman penarikan pasukan AS, secara lebih dekat, pemerintah AS telah mengajukan permintaan terhadap pemerintah Korea Selatan untuk dapat menggunakan pangkalan militer AS di Korea (USFK) sebagai penampungan pengungsi Afghanistan pada Sabtu, 21 Agustus 2021. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Chung Eui Yong membenarkan permintaan AS tersebut, akan tetapi pembahasan terkait hal itu masih dalam tahap awal (Kim 2021b). Menteri Chung juga menyebutkan bahwa hal ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Korea Selatan untuk menerima pengungsi. Selanjutnya Menteri Chung juga menyebutkan bahwasanya pemerintah secara terpisah sedang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan atas pengungsi Afghanistan (Kim 2021b).

Selang beberapa hari, pada Senin, 23 Agustus 2021 pada sesi parlemen, Suh Hoon, direktur Kantor Keamanan Nasional Gedung Biru menyebutkan bahwa AS membatalkan permintaan penempatan pengungsi Afghanistan di pangkalan USFK dengan alasan kondisi geografis yang memang jauh dari Afghanistan (Kim 2021b). Juru Bicara dari USFK, Kolonel Lee dalam pernyataan persnya menyebutkan bahwasanya jika memang nantinya mereka ditugaskan dan pemerintah Korea Selatan menerima, USFK akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Pertahanan AS dan pemerintah Korea Selatan itu sendiri (The New York Times 2021). Hal ini dilakukan guna mempertahankan aliansi Korea Selatan-AS dan kewajiban untuk menyediakan dan mempertahankan postur pertahanan gabungan yang kuat.

Terlihat bahwasanya pemerintah Korea Selatan menanggapi secara positif saat AS pertama kali mengungkapkan permintaannya. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Choi Jong-Moon juga turut berpartisipasi dalam konferensi video yang dilakukan dengan 25 negara lainnya yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman pada Jumat, 20 Agustus 2021 (Kim 2021a). Menegaskan kembali komitmen awal komunitas internasional dalam bekerja sama untuk mencapai pembentukan dan stabilitas di Afghanistan terutama menanggulangi pengungsi. Selain itu mereka juga menegaskan aksebilitas merupakan hal penting terkait kepergian para warga Afghanistan menyusul kembalinya Taliban.

Kedua, UNHCR sebagai salah satu badan UN yang mengurus masalah penyebaran pengungsi terutama saat semakin meningkatnya jumlah masyarakat Afghanistan yang melarikan diri mengeluarkan pernyataan pada Agustus tahun 2021. Ada beberapa poin yang menjadi himbauan bagi negara di dunia terutama yang sudah meratifikasi Refugee Convention 1951. Yakni UNHCR mengimbau semua negara untuk dapat memberikan izin bagi warga sipil dan memastikan penghormatan atas prinsip *non refoulement*, UNHCR mengharuskan dan memastikan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan semua penduduk Afghanistan yang mencari perlindungan internasional harus diproses sesuai

dengan hukum pengungsi internasional, UNHCR menganggap tidak tepat untuk menolak perlindungan internasional bagi warga Afghanistan atas dasar relokasi internal (United Nations High Commission for Refugees 2021).

Melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh UNHCR tersebut terlihat adanya imbauan bagi semua negara di dunia terutama yang telah meratifikasi Refugee Convention 1951 untuk dapat membantu penyelamatan pengungsi Afghanistan tahun 2021. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Choi Joong Moon, wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dalam konferensi pers pada 25 Agustus 2021 menyebutkan, “Penerimaan dan evakuasi ini sebagai salah satu bentuk tanggungjawab moral dari Korea Selatan serta posisi Korea Selatan sendiri sebagai bagian dari komunitas Internasional sehingga membuat pemerintah membuka pintu dan keputusan untuk menerima pengungsi” (Maresca 2021).

3. *Domestic-international Conjunctural Parameter*

Berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Blavoukus dan Bourantonis, terdapat parameter ketiga yaitu *domestic-international conjunctural parameters*. Pada penelitian ini, peneliti tidak menemukan faktor konjungtural yang relevan sehingga memengaruhi penerimaan pengungsi Afghanistan oleh Korea Selatan pada Tahun 2021 melalui Operation Miracle.

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwasanya terdapat dua parameter utama yang memengaruhi penerimaan pengungsi Afghanistan oleh Korea Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan *domestic structural parameter* terdapat faktor yang memengaruhi berasal dari pengaruh partai progresif dalam eksekutif dan legislatif terutama penerimaan atas pengungsi. Selain itu adanya dorongan dari gabungan kelompok advokasi HAM yang tergabung di dalam *Refugee Human Rights Network* dengan merangkul lebih dari 100 organisasi lainnya. Selanjutnya kelompok Kristen konservatif di Korea Selatan turut memberikan desakan

kepada pemerintah. Sedangkan berdasarkan *international structural parameter* terdapat dorongan AS terhadap Korea Selatan dan peran dari UNHCR. Namun untuk faktor *domestic-international conjunctural parameter* peneliti tidak menemukan faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan ini.

Daftar Pustaka

- Barnett, Laura. 2002. "Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime." *International Journal of Refugee Law* 14 (2-3): 238-62. https://doi.org/10.1093/ijrl/14.2_and_3.238.
- Blavoukos, Spyros, and Dimitris Bourantonis. 2009. "Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach," 15-18.
- . 2014. "Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Eclectic Approach." *Cooperation and Conflict* 49 (4): 483-500. <https://doi.org/10.1177/0010836713517568>.
- Fadil, Hamza, and Shen Yi. 2019. "Effectiveness of Regional Protection Program (RPP) Rezim - International Protection Regime - European Union (EU) in Germany." *Journal of Public Administration and Governance* 9 (4): 164. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15830>.
- Heo, Angie. 2021. "The Border Politics of Anti-Communism and Anti-Discrimination in South Korea." *Religion and Society* 12 (1): 86-101. <https://doi.org/10.3167/ARRS.2021.120107>.
- Jun, Euy Ryung. 2019. "'Voices of Ordinary Citizens': Ban Damunhwa and Its Neoliberal Affect of Anti-Immigration in South Korea." *Critical Asian Studies* 51 (3): 386-402. <https://doi.org/10.1080/14672715.2019.1619466>.
- Lee, Sook-jong, and Sook-jong Lee. 2021. "Democratization and Polarization in Korean Society IN KOREAN SOCIETY" 29 (3): 99-125.
- Mangi, Kim. 2021. "The Successful Completion of ' Operation Miracle ' and Its Significance," no. 239: 1-5.
- Mee, Kim Hyun. 2012. "'Life on Probation': Ambiguity in the Lives of Burmese Refugees in South Korea." *Asian and Pacific Migration Journal* 21 (2): 217-38. <https://doi.org/10.1177/011719681202100205>.
- "Migrants Refugee." n.d.
- Milani, Marco, Antonio Fiori, and Matteo Dian. 2019. *Politics in Asia Series : The Korea Paradox : Domestic Political Divide And Foreign Policy In South Korea*.
- Snyder, S, G.U. Lee, Y.H. Kim, and J.Y. Kim. 2018. "Domestic Constraints on

- South Korean Foreign Policy.” *The Council on Foreign Relations*, 1–79.
- Song, Niu. 2013. “The Taliban Factor in the Republic of Korea’s Afghanistan Strategy.” *Korean Journal of Defense Analysis* 25 (1): 59–72.
- Ulfa, Baiq, Septi Lestari, Lalu Putrawandi Karjaya, and Muhammad Sood. 2021. “Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye Dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara” 3 (June): 81–109.
- Yoon, Myeong-sook, Israel Fisseha, and So-won Suk. 2020. “A Refugee Protection within a Less-Restrictive Immigration Policy and Refugee Protection in South Korea: A Policy Review of 2013’s Refugee Act.” *Asia-Pacific Journal of Convergent Research Interchange* 6 (2): 1–16. <https://doi.org/10.21742/apjcri.2020.02.01>.
- Ja, Ser Myo. 2021. “Operation Miracle Complete with 390 Afghan Arrivals,” 2021. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/08/27/national/socialAffairs/Afghan-Operation-Miracle-Kabul/20210827172000631.html>.
- Jung, Kim Hyeo. 2021. “Afghanistan: Why Is ‘Islamophobia’ Growing in South Korea?” *BBC Korea*, 2021. <https://www.bbc.com/korean/news-58314017>.
- Kim, Sarah. 2021a. “U.S. Bases in Korea Eyed for Afghan Evacuees: WSJ.” *JoongAng Daily*, 2021. <https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/08/22/national/defense/Afghansistan>.
- . 2021b. “U.S. Requests Korea to Allow Evacuees on Bases.” *JoongAng Daily*, 2021Korea, The National Assembly of The Republic of. n.d. “Members by Negotiating Group.” Accessed May 14, 2023. https://korea.assembly.go.kr:447/mem/mem_04.jsp.
- Kyung, Song Eun. 2021. “On the ‘Afghan Acceptance’ Claim... Spreading ‘anti-Refugee’ Sentiment Online.” *Yonhap News Agency*, 2021. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210822039600004>.
- Maresca, Thomas. 2021. “South Korea Cites ‘moral’ Obligation to Receive Hundreds of Afghan Evacuees.” *United Press Internasional*, 2021. https://www.upi.com/Top_News/World-News/2021/08/25/south-korea-afghanistan-evacuees/6091629881003/.
- Network, Refugee Human Rights. 2021. “South Korean Agencies Should Help Create Protection for At-Risk Afghan Refugees.” Pople Power. 2021. <https://www.peoplepower21.org/Solidarity/1813543>.
- New York Times. 2018. “Just 2 of More Than 480 Yemenis Receive Refugee Status in South Korea,” 2018. <https://www.nytimes.com/2018/12/14/world/asia/yemen-south-korea-refugees.html>.
- Slavney, Seoho Lee dan Natalia. 2021. “Afghanistan Crisis Reignites South Korea’s Refugee Debate.” *The Diplomat*, 2021.

<https://thediplomat.com/2021/10/afghanistan-crisis-reignites-south-koreas-refugee-debate/>.

- Sujin, Na. 2021. “The Church Must Step Up to Accept and Help Afghan Refugees.” *News and Joy*, 2021. <https://www.newsjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=303238> .
- The Korean Times. 2021. “Taliban Go Door-to-Door Hunting for Christians.” *The Korean Times*, 2021. <http://m.koreatimes.com/article/20210823/1377275>.
- The New York Times. 2021. “US Considers American Bases in Korea Housing Site for Afghan Evacuees: Report.” *The New York Times*, 2021.
- Yonhap News Agency. 2021. “(2nd LD) Moon Says S. Korea Has Shown Its Dignity by Embracing Afghan Evacuees,” 2021. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20210830005952315>.
- Ministry of Justice Republik of Korea. 2022. “Ministry of Justice Republik of Korea.” 2022. <https://www.moj.go.kr/moj/2417/subview.do> .
- Ministry of National Defense Republik of Korea. 2021. “Ministry of National Defense Republik of Korea,” 2021. <https://www.mnd.go.kr/user/boardList.action?command> .
- UNHCR. 2022a. “Figure a Glance’ 2022.” 2022. <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html> .
- . 2022b. “The 1951 Refugee Convention.” 2022. <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html> .
- United Nations High Commission for Refugees. 2021. “Unhcr Position on Returns To Afghanistan,” no. August: 1–3.